

TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PERANANNYA MENGEMBANGKAN UMKM

Muhammad Sholahuddin, SE, M.Si.

Universitas Muhammadiyah Surakarta

e-mail: didinsolo@yahoo.com, msuddin@ums.ac.id

Abstrak

Perbankan syariah mempunyai peranan strategis dalam meningkatkan usaha UMKM terutama dalam masalah pendanaan dan supporting dalam masalah pendampingan teknis and non teknis. Secara kualitatif memang perbankan syariah sudah melakukan berbagai strategi (1)inovasi strategi pembiayaan; (2)Program Linkage; (3)Pilot project; (4) Pemanfaatan dana sosial; (5)kerjasama technical assistance. Namun secara kuantitatif ternyata peran perbankan syariah terhadap UMKM masih belum memuaskan. Banyak pihak mempunyai ekspektasi terlalu besar terhadap peran perbankan syariah terhadap UMKM. Padahal sistem keuangan syariah nasional mempunyai permasalahan fundamental yang menyebabkan berbagai pihak terkait mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan fungsi syariah sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Tantangan utama lembaga keuangan syariah adalah menyelesaikan permasalahan fundamental tersebut yang terdiri dari kerangka sistem yang berbasis pada bunga, ketidakstabilan standar mata uang dan pola pikir permissive akibat lingkungan kehidupan kapitalistik.

Keywords: Perbankan Syariah, peranan strategis, UMKM, fundamental, tantangan

Abstract

Islamic banking has a strategic role in improving the MSMEs business, especially in the matter of funding and supporting in technical and non technical assistance. Qualitatively Islamic banking has been implementing several strategies (1) innovative financing strategies; (2) linkage Program; (3) pilot project; (4) utilization of social funds; (5) technical assistance cooperation. But quantitatively the role of Islamic banking to SMEs is still not satisfactory. Many parties have too great expectations of the role of Islamic banking to MSMEs. Though national Islamic financial system has fundamental problems that caused the various stakeholders have difficulty in optimizing the function of sharia as a mercy to all mankind. The main challenges of Islamic financial institutions are to resolve the fundamental problems consisting of the financial system framework is still based on interest rates, volatility currencies standard and permissive mindset due to the capitalistic worldview.

Keywords: Islamic banking, strategic role, SMEs, fundamental, challenges

Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia. Jumlah pelaku usaha sektor tersebut menurut data Biro Pusat Statistik Indonesia (BPS, 2011) mencapai 55,2 jutaan unit usaha atau 99,99% dari seluruh unit usaha di Indonesia dan mempekerjakan 101,7 juta pekerja (97,2%).

Namun jumlah persentase tersebut semestinya bukan sesuatu yang harus dibanggakan dan mendapatkan pujian terutama ketika terjadi badai krisis tahun 1998, terbukti sektor UMKM paling mampu bertahan. Hal itu karena UMKM tergantung pada muatan lokal. Mereka menggunakan sumber daya dalam negeri baik sumber daya manusia, bahan baku dan peralatan sehingga mereka tidak tergantung pada ekspor. Selain itu,

hasil produksi sektor UMKM lebih ditujukan untuk memenuhi pangsa pasar dalam negeri, sehingga tidak tergantung kepada kondisi perekonomian negara lain.

Jumlah persentase UMKM yang dominan tersebut berkontribusi terhadap PDB sebesar Rp4,3 triliun (58%) serta memberikan sumbangan devisa (ekspor-impor) hanya sebesar Rp187,4 triliun (16,4%). Itu menandakan ada sesuatu yang harus dibenahi. Data tersebut dapat diartikan bahwa nasib usaha mikro dan kecil tidak banyak mengalami perubahan yang berarti selama bertahun-tahun. Semestinya para pelaku usaha mikro dan kecil ini segera meningkat menjadi pengusaha menengah dan besar sehingga diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan PDB, penyerapan tenaga kerja dan sumbangan devisa lebih besar lagi.

Ada beberapa penyebab kelambanan UMKM meningkat menjadi usaha besar. Menurut Urata (dalam Adiningsih, 2009) diantaranya karena UMKM seringkali tidak dapat lepas dari dua masalah utama, yaitu finansial dan nonfinansial (organisasi manajemen). Masalah finansial utama adalah ketidaksesuaian (*mismatch*) antara dana yang tersedia dan yang bisa diakses. Selain itu, tak ada pendekatan sistematis dalam pendanaan; biaya transaksi yang tinggi, prosedur kredit yang akhirnya menyita banyak waktu padahal nilai kredit yang dikururkan kecil; kurang akses ke sumber dana formal; bunga kredit untuk investasi dan modal kerja cukup tinggi; dan banyak UMKM yang belum *bankable*.

Sedangkan termasuk dalam masalah organisasi manajemen (non-finansial) menurut Adiningsih (2009) antaranya adalah: kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan *quality control* yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan, kurangnya pengetahuan akan pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UKM mengenai pasar, selain

karena keterbatasan kemampuan UKM untuk menyediakan produk/jasa yang sesuai dengan keinginan pasar, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) secara kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM, kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi. Disamping itu menurut Tambunan (2009) UKM juga menghadapi permasalahan ekspor dan linkage antar perusahaan.

Dengan berbagai hambatan yang dihadapi oleh UMKM tersebut, maka pemerintah dan pihak-pihak terkait, semestinya dengan cepat berperan aktif dalam mendorong sektor ini berkembang dengan lebih baik. Salah satu pihak yang diharapkan mempunyai peranan besar terhadap hal tersebut adalah perbankan syariah. Syahyuti (2005) dalam review 10 penelitian tentang potensi dan persepsi masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia mengungkapkan bahwa rata-rata 30 persen responden berpotensi untuk mengadopsi produk perbankan syariah. Dengan potensi pasar bank syariah yang besar tersebut, bagaimana kontribusi industri perbankan syariah Indonesia terhadap pertumbuhan sektor UMKM? Tulisan ini akan mendiskusikannya.

Peran Perbankan Syariah

Untuk mengetahui peran perbankan syariah terhadap UMKM dapat melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dengan pendekatan kualitatif dapat diketahui keberpihakan bank syariah pada sektor UMKM. Menurut Asiyah (2009) program tersebut diantaranya; (1) inovasi strategi pembiayaan; (2) *Program Linkage*; (3) *Pilot project*; (4) Pemanfaatan dana sosial; (5) kerjasama *technical assistance*.

Masing-masing bank syariah mempunyai berbagai strategi pembiayaan misalkan bank syariah didirikan pusat-pusat pelayanan pembiayaan mikro seperti gerai UKMM atau sentra UMKM. Di samping itu dikembangkan pula konsep *linkage*, dimana bank syariah yang lebih besar menyalurkan pembi-

yaan UMKM-nya melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil, seperti BPRS dan BMT. Program ini berjalan karena bank syariah besar belum menjangkau sentra masyarakat usaha mikro dan kecil. Di samping itu lembaga keuangan syariah yang kecil lebih menyentuh langsung dengan pelaku usaha UMK.

Menurut Sakti (2010) model pembiayaan linkage antara bank syariah dengan BPRS atau BMT dapat berupa *joint financing*, *executing* atau *channeling*. Joint financing adalah bank syariah dan BPRS/BMT bersama-sama memberikan pembiayaan pada pelaku UMKM. Sedangkan *executing* adalah bank syariah menyediakan pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh BPRS atau BMT dalam pembiayaan mereka ke nasabah UMKM-nya. Sementara *channeling* menempatkan BPRS atau BMT sebagai lembaga perantara BUS/ UUS dengan pelaku UMKM.

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah dan UUS diberi wewenang menjalankan fungsi sosial, yaitu menerima dana zakat, infak, sedekah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Dari 8 BUS dan 4 UUS yang telah melaporkan pelaksanaan fungsi sosial dan linkage pada Bank Indonesia, jumlah dana yang telah dikumpulkan dan/atau disalurkan perbankan syariah selama tahun 2012 (s.d Oktober 2012) adalah: (i) dana CSR Rp42,2 milyar, (ii) dana ZISW Rp52,7 milyar, (iii) linkage program BPRS Rp207,2 milyar dan (iv) linkage program BMT Rp439,2 milyar (Bank Indonesia, 2012).

Perbankan syariah juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan atau pengelola dana sosial dalam upaya meningkatkan budaya kerja, kemampuan manajemen UMKM dan penguasaan teknologi.

Secara kuantitatif kita dapat menganalisis data statistik dari Bank Indonesia (Jan 2013). Sampai dengan Januari 2013, industri perbankan syariah berkembang dengan 35

bank syariah yang terdiri dari 11 bank umum syariah (BUS), 24 unit usaha syariah (UUS) diperkuat dengan 158 bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), yang kesemuanya memiliki jaringan kantor mencapai 2.699 unit. Bila dibandingkan dengan tahun 2010, nampaknya perbankan syariah selama 2 tahun ini fokus pada peningkatan jaringan (tahun 2010 dengan jaringan kantor 1.763) atau mengalami pertumbuhan jaringan 53%, bukan pada peningkatan jumlah perbankan syariahnya yang hanya bertambah 1 bank saja.

Sementara, pembiayaan perbankan syariah (BUS, UUS dan BPRS) pada sektor UMKM jika dibandingkan antara tahun 2010 dengan awal tahun 2013 memang mengalami peningkatan dari Rp52,710 triliun menjadi Rp94,729 triliun namun dari sisi porsi (share) dari keseluruhan pembiayaan perbankan syariah selama 2 tahun ini justru mengalami penurunan dari 76,43% menjadi 61,1%. Disamping itu pada tahun 2010 porsi pembiayaan modal kerja adalah terbesar, namun Januari 2013 pembiayaan konsumsi adalah terbesar porsinya.

Persentase pembiayaan non lancar (NPF) awal tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2010 memang mengalami penurunan dari 3,02% menjadi 2,49%. Namun jika dicermati jumlah rupiahnya justru terjadi peningkatan jumlah pembiayaan non lancar dari Rp 2.061 miliar menjadi Rp 3.725 miliar. Sedangkan NPF pada BPRS memang semakin meningkat yang semula Rp 133.972 juta (6,5%) menjadi Rp 246.340 juta (6,91%). Meskipun dalam rupiah relatif besar namun persentase pembiayaan non lancar pada UMKM mengalami penurunan yang drastis dibandingkan tahun 2010 semula 88,5% pada awal tahun 2013 menjadi 65,24% dari total NPF. Sebaliknya NPF pada BPRS mengalami kenaikan namun relatif kecil dari 65,6% menjadi 67,5%. Pembiayaan non lancar terbesar BUS dan UUS pada sector ekonomi lain-lain mencapai 29% dari total NPF. Sedangkan

NPF pada BPRS terbesar di sektor perdagangan, restoran dan perhotelan sebesar 42,27%.

Tantangan

Perbankan syariah sudah menjalankan berbagai strategi untuk berperan dalam pengembangan UMKM, namun secara kuantitatif sampai Januari 2013 belum begitu memuaskan. Hal tersebut dapat terjadi karena aspek makro, mikro dan epistemologi pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Penyebab dari aspek makro terutama disebabkan karena melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya krisis ekonomi di beberapa Negara (Bank Indonesia, 2012). Pada aspek mikro, menurut Sakti (2011) perlu upaya perbaikan sarana atau infrastruktur, baik berupa infrastruktur yang bersifat fisik maupun non-fisik, agar sektor tersebut mampu memproduksi dan berkinerja efisien. Pembinaan sektor UMKM diharapkan mampu menekan persepsi risiko tinggi yang melekat pada sektor tersebut. Sedangkan pada sisi perbankan syariah perlu peningkatan pengetahuan dan keahlian bankir syariah pada dunia UMKM di semua sektor. Sehingga pembiayaan perbankan syariah tidak hanya terkonsentrasi pada sektor retail, jasa usaha dan perdagangan saja tetapi juga sektor potensial lainnya, khususnya sektor produktif seperti sektor pertanian dan manufaktur.

Sedangkan dari sisi epistemologi pengembangan lembaga keuangan syariah nampaknya secara *mainstream* masih menggunakan pendekatan Islamisasi lembaga keuangan konvensional dengan berasaskan pada kaidah maslahat. Sehingga sampai saat ini lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak akan mampu melepaskan diri dari permasalahan fundamental seperti kerangka sistem yang berbasis pada bunga, ketidakstabilan standar mata uang dan pola pikir permissive akibat lingkungan kehidupan yang belum ideal.

Penutup

Dalam sistem kapitalisme, perbankan di ibaratkan sebagai jantung yang memompa darah berupa uang agar mengalir lancar. Namun dalam darah itu ada zat-zat yang membahayakan tubuh, yaitu berupa *interest-based system*, uangnya tidak berstandar emas/ perak dan lingkungan yang kapitalistik.

Berbeda dengan pendekatan sistem ekonomi Islam dimana jantungnya adalah baitul mal. Sehingga darah yang berupa uang dengan standar emas dan perak akan mengalir lancar di sektor riil dengan pelaku UMKM dengan *support* negara secara penuh. Dengan lingkungan kehidupan yang jauh dari kapitalistik akan dihasilkan sistem keuangan Islam yang akan menjadi rahmat bagi seluruh umat. Kita tidak dapat menyerahkan kewajiban penyelesaian permasalahan fundamental ini hanya kepada perbankan syariah. Sekecil apa pun peran kita, menjadi kewajiban bersama untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, Sri, 10 Januari 2009., Regulasi dalam revitalisasi usaha kecil dan menengah di Indonesia. Bali-Seminar. http://lfip.uscschooloflaw.org/english/pdf/bali-seminar/regulasi_dalam_revitalisasi-sri_adiningsih.pdf
- Aisyah, Siti, 2009, Pemberdayaan UKM Melalui Bank Syariah Berbasis Kearifan Lokal, *Jurnal Manajemen Gajayana* vol. 6 No.2 November 2009, 127-136
- Badan Pusat Statistik, Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (Ub) Tahun 2010-2011, www.bps.go.id
- Bank Indonesia, Outlook Perbankan Syariah 2013, Desember 2012, www.bi.go.id
- Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah Januari 2013, www.bi.go.id
- Sakti, Ali, 2011, Peran Perbankan Syariah

dalam Pemberdayaan UMKM,
<http://abiqsa.blogspot.no/2011/03/peran-perbankan-syariah-dalam.html>
diakses 11 Maret 2012

Syahyuti, 2005, Review 10 penelitian tentang Bank Syariah, idb2.wikispaces.com/file/view/20.pdf diakses 10 Maret 2013

Tambunan, Tulus, 2009, Development of small and medium enterprises in

ASEAN countries, Readworthy Publication (P) Ltd.

Urata, Shujiro, 2000, "Policy recommendations for SMEs promotion in Indonesia", report to the Coordination Ministry of Economy, Finance and Industry, Jakarta